

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie.Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.

_____, 2007, *Profil Singkat Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,

_____, 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

_____, 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press: Jakarta.

_____, 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokras*. Konstitusi Press: Jakarta.

_____, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI,

_____, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.

_____, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bahan ceramah pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 19 April 2008,

_____, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 581.

Arrasjid. Chainur, 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cetakan Keempat*. Sinar Grafika: Jakarta.

Chand., Hari, *Modern Jurisprudence*

Fatkhurrohman, dkk, 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Lubis. M. Solly, 2002. *Hukum Tata Negara*. Mandar Maju: Bandung

Marzuki. Peter Mahmud, 2005, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta,

MD. Mahfud, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES: Jakarta.

Manan. Bagir, 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-Hill. Co: Jakarta.

Mertokusumo.Sudikno, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima*. Liberty: Yogyakarta.

Prodjodikoro.Wirjono, 1977. *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*. Dian Rakyat: Jakarta. Taufiqurrahman Syahuri, 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Samidjo, 1992. *Ilmu Negara. Cetakan Keempat*. CV. Armico: Bandung.

Soemantri. Sri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar*, Citra Aditya, Bandung.

Soerjadi.D. Trimoeldja, 2004, *65 Tahun Trimoeldja D. Soerjadi. Lendala Menegakkan Kebenaran dan Keadilan*, Guna Widya, Surabaya.

Syahuri. Taufiqurrahman, 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Ghalia Indonesia: Bogor

Artikel/ jurnal/ majalah:

Mahkamah Konstitusi, *CD kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2007*. Biro Administrasi Perkara dan Persidangan: Jakarta.

Rully Chairul Anwar, 2006. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Mengawal dan Penafsir Konstitusi dalam Berita Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Edisi September-Oktober*.

Aidul Fitriciada Azhari, 2005, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: hlm 110

Franky Butar Butar, 2006. *Mengoptimalkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*.

FaizKusumawijaya, *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*.

Saldi Isra, “*Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*” Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-49 Universitas Andalas, 13 September 2005

Bambang Sutyoso, *Beberapa Permasalahan dalam Pengajuan Permohonan di Mahkamah konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume IV Nomor 2, Juni 2007, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2007.

Luthfi Widagdo Eddyono, MK Buka Peluang Calon Independen Dalam Pilkada. [www. mahkamahkonstitusi.com](http://www.mahkamahkonstitusi.com) diakses Selasa , 24 Juli 2007 15:36:29

Sulardi, Analisis Putusan, *Antara Kebebasan Mencari Nafkah dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luarnegeri*. Jurnal Konstitusi Volume 4 No 2 Juni 2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)*.

_____, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

_____, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

_____,*Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;*

_____,*Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Pemerintahan Daerah*

_____, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;*

Mahkamah Konstitusi, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*

_____,*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu;*

_____,*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17PUUV2007 Tantang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeruntahan Daerah*

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4 /PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Legislatif dan Dpd dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeruntahan Daerah.*

Internet:

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://www.jimly.com>

[http://www.pdf-search-engine.com/Mahkamah+Konstitusi.](http://www.pdf-search-engine.com/Mahkamah+Konstitusi)